

STRATEGI PERBANKAN SYARIAH DALAM MENINGKATKAN INKLUSI KEUANGAN DI WILAYAH BANTEN: PELUANG DAN TANTANGAN

Rahmadanty Musrifa Chumairo Dewy
STAI KH. Abdul Kabier
rahmadantymusrifa@staikha.ac.id

Abstract

This research discusses the strategy of Islamic banking in increasing financial inclusion in the Banten region by analyzing the opportunities and challenges that exist. Banten Province is the center of increasing the Islamic economy and finance in Indonesia, marked by the presence of the Sharia Tower, which is an area that is part of the center of Islamic civilization in Indonesia and even globally in terms of implementing and increasing the Islamic economy and finance. Banten also has a Muslim majority population with the slogan of faith and piety, ranking 2nd in the number of Islamic boarding schools in Indonesia with a total of 5,344 Islamic boarding schools. The challenges faced include access to Islamic financial services which is still lacking and uneven to rural areas, the Islamic economic and financial literacy index is also not significant including the Banten region. The results of the study show that the strategy that can be carried out is to provide education to the Banten community widely regarding Islamic economic and financial literacy (knowledge, skills, attitudes, behavior, and beliefs towards financial service institutions), provide community-based financial services/agencies for various Islamic financial services, and collaborate with Islamic boarding schools, business sectors, mosques, and other communities to develop Islamic financial inclusion in Banten.

Keywords: Strategy, sharia banking, financial inclusion, opportunities, challenges

Abstrak

Penelitian ini membahas strategi perbankan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Banten dengan menganalisis peluang dan tantangan yang ada. Provinsi Banten menjadi pusat peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan adanya Menara Syariah, yang merupakan sebuah kawasan yang menjadi bagian dari pusat peradaban Islam di Indonesia bahkan global dalam hal penerapan serta peningkatan ekonomi dan keuangan syariah. Banten juga memiliki penduduk mayoritas Muslim dengan slogan iman dan takwa menempati peringkat ke-2 jumlah pondok pesantren terbanyak se-Indonesia dengan total 5.344 pondok pesantren. Tantangan yang dihadapi diantaranya akses layanan keuangan syariah masih kurang dan tidak merata sampai ke pedesaan, indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah juga tidak signifikan termasuk wilayah Banten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi yang bisa dilakukan dengan memberikan edukasi masyarakat Banten secara luas terhadap literasi ekonomi dan keuangan syariah (pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan), memberikan layanan keuangan berbasis komunitas/ keagenan berbagai layanan keuangan syariah, dan berkolaborasi dengan pondok pesantren, sektor usaha, masjid, dan komunitas lainnya untuk mengembangkan inklusi keuangan syariah di Banten.

Kata kunci : strategi, perbankan syariah, inklusi keuangan, Banten, peluang, tantangan

PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami perkembangan yang pesat. Perkembangan ini ditunjukkan dengan lembaga keuangan syariah seperti munculnya perbankan syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, reksadana syariah, dan sebagainya. Di pasar keuangan syariah, sektor perbankan syariah telah

berkembang cepat dan memiliki pengaruh signifikan terhadap perekonomian lokal. Sektor perbankan syariah memiliki kemampuan untuk membantu transformasi ekonomi menjadi ekonomi yang inklusif, produktif, dan bernilai tambah. Layanan perbankan yang memanfaatkan teknologi termasuk digital banking, sistem jalur pembayaran, dan lainnya diharapkan akan meningkatkan kualitas operasional dan layanan perbankan bagi masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi di masyarakat, teknologi diperlukan untuk diterapkan dalam industri perbankan (Husna, 2020). Industri perbankan merupakan salah satu bidang ekonomi keuangan yang membutuhkan teknologi. Terkait hal ini, di dunia perbankan dikenal dengan istilah teknologi finansial. Jenis inovasi dalam industri keuangan yang disebut FinTech telah menggunakan perangkat teknologi untuk membuat layanan keuangan menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, gagasan FinTech ini bergabung dengan industri perbankan untuk menghasilkan ide-ide baru yang memungkinkan transaksi keuangan yang lebih efisien.

Jumlah penduduk beragama Islam di Indonesia sebanyak 248,37 juta jiwa hingga akhir tahun 2023 yang memberinya peluang besar untuk mengembangkan kemajuan perbankan syariah berbasis digital di era saat ini, menurut data dari Badan Pusat Statistik. Pada saat ini, mayoritas bank umum di Indonesia telah memiliki produk bank yang dioperasikan dengan prinsip pengelolaan dana syariah (Werdi et al., 2017).

Inklusi keuangan merupakan entitesis dari financial exclusion. Dibutuhkan inovasi baru untuk mewujudkan kehidupan ekonomi yang inklusif, karena praktik ekonomi eksklusif telah menyebabkan kemiskinan dan pengangguran meningkat. Dalam kenyataannya, sistem layanan keuangan inklusif bertujuan untuk menciptakan karakter kehidupan ekonomi yang mendukung kalangan berpenghasilan rendah dan miskin (Mardani et al., 2018). Menurut Andrew Leyson dan Nigel Thrift, financial exclusion mengacu pada prosedur yang menghalangi kelompok sosial kurang mampu dan kurang beruntung dari akses ke sistem keuangan formal. Karena pendapatan, pembangunan ekonomi, dan perbedaan geografis mengakibatkan pembangunan yang tidak merata (Leyson et al., 2015).

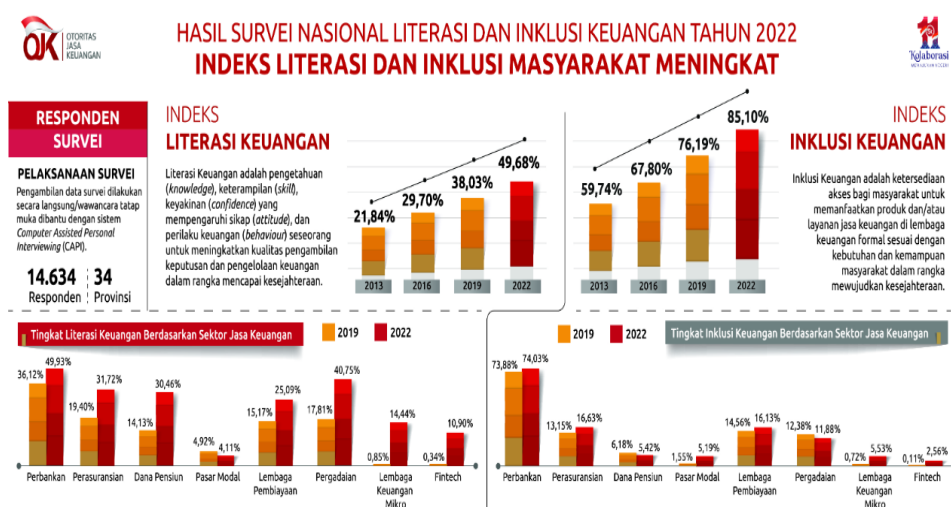
Pada tahun 2010, inklusi keuangan baru dimulai di Indonesia. Dalam upaya, untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan, Bank Indonesia meluncurkan program National Strategy for Inklusi Keuangan (NSFI). Selama ini, 76 juta orang, atau 32% dari populasi, sama sekali belum tersentuh jasa keuangan. Selain itu, sekitar 60 - 70% usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak memiliki akses ke perbankan. Walaupun begitu, hampir 53 juta masyarakat miskin yang bekerja di sektor UMKM memiliki peluang yang sangat besar untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran (Nengsih, 2023).

Di Indonesia, perbankan syariah memainkan peran penting dalam penerapan inklusi keuangan. Pada tahun 2008, industri perbankan syariah memiliki 155 anggota, terdiri dari 3 Bank Umum Syariah (BUS), 28 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 124 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Jumlah ini saat ini terus meningkat seiring kesadaran masyarakat akan menggunakan produk keuangan syariah. Ada 13 Bank Umum Syariah (BUS), 33 Unit Usaha Syariah (UUS), dan 169 Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia pada Januari 2023 (OJK, 2023). Ini menunjukkan bahwa perbankan syariah berkembang di tengah ketidakpastian ekonomi, seperti yang terjadi pada tahun 1998, 2008, dan krisis yang melanda Eropa pada tahun 2011.

Perkembangan kuantitas ini telah menyebar dari pusat ke daerah, sehingga semua lapisan masyarakat dapat mengaksesnya. Jika inklusi keuangan mampu mendorong pemulihan ekonomi dan mempengaruhi stabilitas ekonomi Indonesia, maka pertumbuhan ekonomi dapat berkorelasi dengannya. Menurut Pasal 12 Peraturan OJK No. 76 Tahun 2016,

inklusi keuangan bertujuan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap barang dan jasa keuangan, meningkatkan ketersediaan barang dan jasa keuangan, dan meningkatkan jumlah dan kualitas penggunaan barang dan jasa keuangan. Terlihat bahwa tiga elemen utama inklusi keuangan adalah: (1) memberikan akses yang mudah; (2) menyediakan layanan terbaik; dan (3) menyediakan produk keuangan dengan kualitas terbaik.

Pada 22 November 2022, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menyelenggarakan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) tahun 2022 untuk mengukur indeks literasi dan inklusi keuangan masyarakat Indonesia. SNLIK 2022 berlangsung dari Juli hingga September 2022 di 34 provinsi dan 76 kota/kabupaten, dengan jumlah responden 14.634 orang berusia antara 15 dan 79 tahun. SNLIK 2022 juga menggunakan metode, parameter, dan indikator yang sama seperti tahun 2016 dan 2019. Indeks literasi keuangan terdiri dari pengetahuan, keterampilan, keyakinan, sikap, dan perilaku, sedangkan indeks inklusi keuangan menggunakan parameter penggunaan (usage).



Hasil SNLIK 2022 menunjukkan indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia sebesar 49,68 persen, naik dari 38,03 persen pada tahun 2019, dan indeks inklusi keuangan sebesar 85,10%, meningkat dari periode SNLIK sebelumnya 76,19% pada tahun 2019. Selain itu, SNLIK 2022 mengukur literasi dan inklusi keuangan syariah masyarakat Indonesia.

Perbandingan Indeks Literasi Dan Inklusi Keuangan Syariah

Indeks Syariah	2019	2022
Literasi	8,93%	9,14%
Inklusi	9,10%	12,12%

Hasilnya menunjukkan indeks literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia meningkat dari 8,93% pada tahun 2019 menjadi 9,14% pada tahun 2022. Selain itu, tingkat inklusi keuangan syariah juga meningkat dari 9,10% pada periode survei pada tahun 2019 menjadi 12,12% di tahun 2022.

Banten sebagai provinsi mayoritas masyarakat muslim dan memiliki slogan “Iman dan Takwa” tentu memiliki kepentingan untuk membangun ekonomi dan keuangan masyarakat yang Islami. Perkembangan perbankan syariah di Provinsi Banten dalam beberapa tahun terakhir mengalami peningkatan ditandai dengan bermunculannya lembaga - lembaga keuangan syariah di Banten. Maka bukan tidak mungkin inklusi keuangan di wilayah Banten pun akan meningkat dengan menjalankan beberapa strategi yang akan dibahas dalam penelitian ini.

KAJIAN TEORI

A. Inklusi Keuangan

Tujuan utama dari skema pembiayaan inklusif yang dikenal sebagai inklusi keuangan adalah untuk menyediakan berbagai layanan keuangan kepada masyarakat miskin yang berpenghasilan rendah. Terlepas dari definisi PBB, istilah inklusi keuangan mengacu pada akses ke berbagai jasa keuangan dengan biaya yang wajar bagi individu yang dianggap tidak bankable serta individu yang bekerja di sektor pedesaan, seperti pertanian dan peternakan (Imboden et al., 2006).

Sejalan dengan PBB, Rangarajan Komite mendefinisikan inklusi keuangan sebagai proses untuk memastikan bahwa layanan keuangan diberikan kepada orang miskin atau berpenghasilan rendah. Mereka biasanya berupa kredit dengan jangka waktu dan biaya pengembalian yang wajar (Dasgupta, 2009). Dalam penelitiannya yang berjudul *Opportunities and Obstacles to Financial Inclusion*, Gayathri Band, Kanchan Naidu, Tina Mehadia mengatakan bahwa inklusi keuangan adalah ketika kelompok miskin dan rentan memiliki akses ke pembiayaan, yang merupakan syarat untuk pengurangan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Mereka juga mengatakan bahwa memberikan akses ke layanan keuangan dengan harga terjangkau merupakan bentuk pemberdayaan kelompok miskin (Band Gayathri et al., 2012).

B. Perbankan Syariah

Menurut Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (2008), Perbankan Syariah mencakup semua yang berkaitan dengan Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, termasuk kelembagaan, bisnis, dan metode dan prosedur untuk menjalankan bisnis mereka. Menurut DPR RI, Bank Syariah terdiri dari Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Khmous et al., (2020), saham perbankan syariah umumnya berdampak negatif terhadap inklusi keuangan. Hal ini disebabkan oleh produk syariah yang tidak menarik, biaya yang tinggi, dan informasi yang kurang tentang pelanggan tentang bank syariah. Namun analisis tersebut menunjukkan pengaruh perbankan syariah terhadap inklusi keuangan lebih besar di negara-negara berpenghasilan tinggi. Penelitian ini juga menemukan bukti bahwa perbankan syariah dapat berkontribusi pada inklusi keuangan yang lebih baik, terutama bagi individu beragama yang menolak bank dengan riba (bunga) (Khmous et al., 2020).

Dalam program pembangunan ekonomi Indonesia, inklusi keuangan telah menjadi fokus utama. Tujuannya adalah untuk memberikan akses keuangan yang lebih luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat. Pengembangan perbankan syariah di sini telah mendapat perhatian khusus sebagai salah satu komponen penting dalam mendukung inklusi keuangan yang berkelanjutan. Sektor keuangan berbasis syariah yang dikenal sebagai perbankan syariah telah berkembang pesat di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Ini menjanjikan untuk memberikan akses keuangan yang lebih adil dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan. Ketersediaan akses ke berbagai sumber daya keuangan yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat disebut inklusi keuangan.

Dalam maqashid syariah, pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan kesejahteraan dan kemakmuran melalui pemerataan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menghindari kesenjangan ekonomi yang dapat membahayakan kesejahteraan masyarakat. Dalam inklusi keuangan, tiga kata kunci utama adalah penyediaan akses, kelompok masyarakat, dan sistem keuangan. Berdasarkan ketiga kata

kunci ini, inklusi keuangan memberikan akses bagi masyarakat miskin, juga dikenal sebagai masyarakat termarginalkan, untuk memiliki dan menggunakan layanan sistem keuangan. Dalam inklusi keuangan, tiga dimensi yang harus diperhatikan adalah aksesibilitas, ketersediaan, dan penggunaan layanan sistem. Hal ini disebabkan fakta bahwa masyarakat miskin lebih rentan terhadap masalah aksesibilitas sektor keuangan dibandingkan dengan masyarakat yang tidak miskin. Indeks Keuangan Inklusif (IKI) adalah indikator keuangan inklusif yang digunakan di Indonesia. Pada dasarnya, IKI adalah upaya Bank Indonesia untuk menggabungkan indikator sektor perbankan yang berbeda untuk mengukur inklusi keuangan. IKI menggunakan indeks multidimensional yang didasarkan pada data makroekonomi, khususnya yang berkaitan dengan jangkauan layanan sektor perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan literatur/ studi kepustakaan. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasilnya dipengaruhi oleh penafsiran dan pemahaman makna dari suatu peristiwa. Saryono (2010) menyatakan penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi, menemukan, menggambarkan, dan menjelaskan aspek sosial atau fenomena yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan secara kuantitatif. Penelitian kualitatif ditujukan untuk menemukan teori baru dan bukan menguji untuk menguji teori yang telah ada dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Literatur atau penelitian kepustakaan (*library research*) merupakan suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data, informasi, dan berbagai macam data-data lainnya yang terdapat dalam kepustakaan. Sehingga pada kajian ini, analisa didasarkan pada teori tentang strategi perbankan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Banten.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peluang

Provinsi Banten menjadi pusat peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan adanya Menara Syariah, yang merupakan sebuah kawasan yang menjadi bagian dari pusat peradaban Islam di Indonesia bahkan global dalam hal penerapan serta peningkatan ekonomi dan keuangan syariah. Hal itu disampaikan Pejabat Gubernur Banten Al Muktabar saat menyambut kedatangan peserta Anugerah Adinata Syariah dari seluruh provinsi se-Indonesia di Menara Syariah Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Kabupaten Tangerang pada Senin, 20 Mei 2024. Penghargaan Adinata Syariah sendiri merupakan salah satu kegiatan yang diselenggarakan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) dalam rangka memberikan apresiasi bagi Pemprov yang memiliki inisiatif mengembangkan potensi ekonomi syariah di daerahnya.

"Di sini dibangun sebuah sistem yang mengoptimalkan lembaga-lembaga keislaman dalam hal keuangan dan ekonomi syariah, dengan berbagai daya dukungnya sehingga terwujud Islam yang rahmatan lil alamin," ungkap Al Muktabar. Di kawasan seluas 1.755 hectare ini, lanjut Al Muktabar, sudah ditetapkan pemerintah sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk juga 12 mil laut yang menjadi kewenangan provinsi yang peruntukan bagi pengembangan kawasan ini. "Inilah bentuk ikhtiar kami dalam mengurangi angka pengangguran di Provinsi Banten. Karena dengan adanya kawasan-kawasan ekonomi dan bisnis seperti ini, daerah sekitar akan merasakan dampak positifnya," jelas Al Muktabar. Dikatakannya, perkembangan ekonomi dan keuangan syariah terus mengalami pertumbuhan yang cukup menggembirakan di Provinsi Banten. Berdasarkan catatan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset perbankan syariah di Provinsi Banten pada akhir tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi Rp1,4 triliun dibanding tahun 2022 sebesar Rp1,243 triliun. "Dan kita akan terus dorong itu untuk ditingkatkan,

sehingga asas manfaatnya bisa lebih besar dirasakan oleh masyarakat," ucap Al Muktabar. (Trust Banten, 21/05/2024)

Selain itu menurut laporan Bank Indonesia pada Februari 2024, perekonomian Provinsi Banten pada triwulan IV 2023 tercatat tumbuh positif yaitu sebesar 4,85% (yoy) namun tumbuh melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,97%. Indeks Harga Konsumen (IHK) Provinsi Banten pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar 3,06% (yoy), lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 2,04% (yoy). Intermediasi perbankan di Provinsi Banten tetap baik dan stabilitas yang terjaga mendukung pemulihan ekonomi. Dari sisi penyaluran kredit/pembiayaan, berdasarkan lokasi proyek di Provinsi Banten pada triwulan IV 2023 tercatat Rp470 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 11,64% (yoy), tumbuh meningkat dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 9,62% (yoy) atau sebesar Rp455,22 triliun. Secara nominal, DPK yang dihimpun oleh perbankan di Provinsi Banten sampai dengan triwulan IV 2023 sebesar Rp264,80 triliun atau tumbuh sebesar 4,35% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,64% (yoy). Aset perbankan di Provinsi Banten pada triwulan IV 2023 tercatat sebesar Rp 310,84 triliun atau tumbuh sebesar 8,27% (yoy). Capaian ini melambat dibandingkan triwulan III 2023 yang tumbuh sebesar 8,80% (yoy).

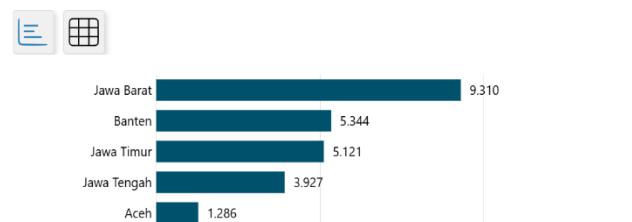
Membaiknya perekonomian Provinsi Banten turut meningkatkan preferensi masyarakat dalam bertransaksi secara nontunai, transaksi melalui BI-RTGS secara nominal mencatatkan nilai Rp245,59 triliun. Sedangkan dari sisi volume, jumlah transaksi BI-RTGS pada triwulan IV 2023 sebanyak 55.607 transaksi. Sedangkan transaksi SKNBI tercatat sebesar Rp9,92 triliun atau sebanyak 214.592 transaksi. Pada triwulan IV 2023, total perputaran uang melalui kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Banten tercatat mengalami *net outflow* sebesar Rp4,60 triliun. *Net outflow* meningkat dibandingkan dengan posisi triwulan III 2023 yang tercatat sebesar Rp2,10 triliun. Transaksi non tunai melalui Kegiatan Usaha Pengiriman Uang (KUPU) atau layanan jasa remitansi oleh PJP LR tercatat mengalami pertumbuhan positif selama triwulan IV 2023 dengan laju pertumbuhan sebesar 67,83% (yoy). Selain itu transaksi jual beli valuta asing turut mengalami pertumbuhan positif sebesar 68,03% (yoy) selama triwulan IV 2023.

Membaiknya pertumbuhan ekonomi berdampak pada penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Banten. TPT pada periode Agustus 2023 yang tercatat sebesar 7,52% menurun dibandingkan Agustus 2022 yang sebesar 8,09%. TPT tercatat semakin menurun sejak puncaknya pada Agustus 2020 yang mencapai 10,64%. Angka ini juga tercatat lebih rendah dibandingkan Tingkat Pengangguran sebelum pandemi Covid-19 yang mencapai 8,16%. Demikian pula dengan tingkat kemiskinan yang kembali melanjutkan tren penurunan menjadi 6,17%. Dari sisi distribusi pendapatan penduduk, tingkat ketimpangan di Banten sebesar 0,368%. (www.bi.go.id)

Peluang lainnya adalah Banten memiliki penduduk mayoritas Muslim dengan slogan iman dan takwa menempati peringkat ke-2 jumlah pondok pesantren terbanyak se-Indonesia dengan total 5.344 pondok pesantren berdasarkan data Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama periode tahun ajaran 2020/2021. Ini menjadi peluang besar dalam meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Banten.

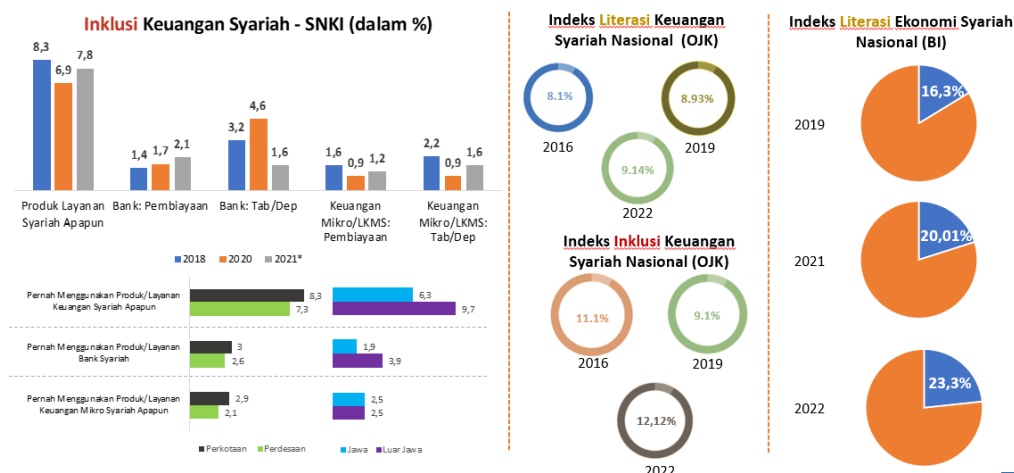
Jumlah Pondok Pesantren di Indonesia Berdasarkan Provinsi (2020/2021)

 databoks



B. Tantangan

Dalam webinar nasional: strategi perbankan syariah dalam meningkatkan inklusi keuangan di wilayah pedesaan dan kepulauan yang diselenggarakan pada 22 Mei 2024 lalu disampaikan bahwa inklusi keuangan syariah nasional sebagai berikut:



Pada gambar di atas, menunjukkan tantangan yang luar biasa karena di beberapa indeks mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Akses layanan keuangan syariah masih kurang dan tidak merata sampai ke pedesaan, indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah juga tidak naik signifikan termasuk wilayah Banten. Chief Economist Bank Syariah Indonesia (BSI) Banjaran Surya Indrastomo mengungkapkan penetrasi bank syariah masih kecil dibandingkan bank konvensional karena:

1. Jaringan

Ia menjelaskan secara jaringan mempengaruhi pelayanan bank syariah ke masyarakat. Ia mengilustrasikan satu kantor layanan bank syariah berbanding 101.426 penduduk Indonesia. Hal ini jauh dengan bank konvensional yang satu kantor layanan bank berbanding 7.951 penduduk Indonesia.

2. Literasi dan Inklusi

Kemudian literasi keuangan pada 2019, perbankan syariah baru 8,93%, sedangkan bank konvensional 38%. Begitu pun dari segi inklusi, perbankan syariah 9,1% dan perbankan konvensional 76,2%.

3. Teknologi dan Informasi dan Saluran Digital

Teknologi informasi dan saluran digital bank syariah pun belum sekuat bank konvensional.

4. Modal

Selanjutnya adalah persoalan modal. Surya mengungkapkan modal bank syariah hanya Rp 47 triliun, jauh dari bank konvensional yang mencapai Rp 1.360 triliun pada 2020. "Ini sebetulnya alasan pemerintah mendorong merger dari bank syariah anak usaha BUMN, sehingga yang diharapkan adalah secara permodalan lebih kuat, secara ukuran lebih besar, secara jaringan itu juga lebih bersaing," katanya dalam paparan virtual Sharia Talk Seru in Ramadhan, Rabu (6/4/2022).

Meski begitu, ia yakin perbankan syariah masih punya peluang berkembang lebih jauh lagi. Poin utamanya adalah, dengan berbagai upaya dari segi literasi dan inklusi akan meningkat. "Sehingga kita juga bisa mendorong pangsa pasar tidak hanya di dunia perbankan, tapi juga industri keuangan," tambah dia. Sebagai informasi, dari segi aset perbankan syariah hanya memiliki aset Rp 694 triliun, jauh dari aset perbankan nasional yang mencapai Rp 10.298 triliun pada 2021. Begitu juga dengan pangsa pasar yang baru 6,7%. Sementara dari segi kredit atau pembiayaan bank syariah hanya menyalurkan sebesar Rp 422 triliun, jauh dari kredit perbankan nasional yang mencapai Rp 5.897 triliun di 2021. Sementara dari sisi dana pihak ketiga (DPK), perbankan nasional sebesar Rp 7.608 triliun dan untuk perbankan syariahnya Rp 549 triliun di tahun yang sama.

C. Strategi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Wilayah Banten

Dari peluang dan tantangan yang ada, maka strategi yang mampu dilakukan dalam meningkatkan inklusi keuangan di wilayah Banten adalah dengan:

1. Memberikan edukasi masyarakat Banten secara luas terhadap literasi ekonomi dan keuangan syariah (pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan).
2. Memberikan layanan keuangan berbasis komunitas/ keagenan berbagai layanan keuangan syariah.
3. Berkolaborasi dengan pondok pesantren, sektor usaha, masjid, dan komunitas lainnya untuk mengembangkan inklusi keuangan syariah di Banten.

KESIMPULAN

Provinsi Banten menjadi pusat peningkatan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia ditandai dengan adanya Menara Syariah, yang merupakan sebuah kawasan yang menjadi bagian dari pusat peradaban Islam di Indonesia bahkan global dalam hal penerapan serta peningkatan ekonomi dan keuangan syariah. Banten juga memiliki penduduk mayoritas Muslim dengan slogan iman dan takwa menempati peringkat ke-2 jumlah pondok pesantren terbanyak se-Indonesia dengan total 5.344 pondok pesantren. Tantangan yang dihadapi diantaranya akses layanan keuangan syariah masih kurang dan tidak merata sampai ke pedesaan, indeks literasi ekonomi dan keuangan syariah juga tidak naik signifikan termasuk wilayah Banten.

Strategi yang bisa dilakukan dengan memberikan edukasi masyarakat Banten secara luas terhadap literasi ekonomi dan keuangan syariah (pengetahuan, keterampilan, sikap, perilaku, dan keyakinan terhadap lembaga jasa keuangan), memberikan layanan keuangan berbasis komunitas/ keagenan berbagai layanan keuangan syariah, dan berkolaborasi dengan pondok pesantren, sektor usaha, masjid, dan komunitas lainnya untuk mengembangkan inklusi keuangan syariah di Banten.

DAFTAR PUSTAKA

- Band Gayathri, Naidu Kanchan, & Mehadia Tina. (2012). Opportunities & Obstacles To Financial Inclusion. *A Journal of Economics and Management*, 1(1).
- Dasgupta, R. (2009). Two Approaches to Financial Inclusion. *Economic and Political Weekly*, 44 (26/27)
- Imboden, K., Herman, B., & Petkoski, D. (2006). Summary Report Econference On: Building Inclusive Financial Sectors for Development: Widening Access, Enhancing Growth, Alleviating
- Khmous, D. F., & Besim, M. (2020). Impact of Islamic banking share on financial inclusion: evidence from MENA. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 13(4)
- Mardani, D. A., Sy, M. E., Tinggi, S., Islam, A., & Jawa Barat, T. (2018). Peran Perbankan Syariah dalam Mengimplementasikan Keuangan Inklusif di Indonesia.
- Nengsih, N. (2023). Strategi Perbankan Syariah dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia. *Al Ittifaq: Jurnal Ekonomi Syariah*, 3(1)
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). SP - Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022
- Werdi, H., Korespondensi, A., & Apriyanti, H. W. (2017). Akuntansi Syariah: Sebuah Tinjauan Antara Teori dan Praktik. In *Jurnal Akuntansi Indonesia* (Vol. 6, Issue 2)